

Studi Perbandingan Sistem Moneter Keuangan Syariah dengan Sistem Konvensional

Suaidi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: suaidi@untirta.ac.id

Article History:

Received: 01 Mei 2023

Revised: 12 Mei 2023

Accepted: 13 Mei 2023

Keywords: Keuangan, Syariah, Konvensional

Abstract: Islam agama yang sempurna menempatkan system ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dengan struktur rukun Islam. Dalam soal ekonomi syariah menetapkan agar mekanisme dan proses kebijakan keuangan terbebas dari riba. Sebab, riba termasuk perbuatan yang dikecam oleh Allah, SWT. Sementara system ekonomi konvensional riba tidak menjadi pertimbangan sehingga berakibat kepada system spekulasi dilakukan yang berakibat teradanya inflasi. Sementara system ekonomi dalam mengambil kebijakan baik terkait dengan moneter selalu mempertimbangkan kemashlahatan dan kemadhorotan yang akan terjadi, sehingga lebih cenderung berhati-hati.

PENDAHULUAN

Makalah ini memuat tentang ekonomi moneter Islam yang akan membahas tentang Ekonomi Moneter Islam terdiri dari mata uang dan moneter dalam pandangan keuangan Islam, kebijakan moneter pada masa Rasulullah, instrumen moneter Islam, prinsip dasar kebijakan moneter Islam, konsep ekonomi moneter Islam dan strategi kebijakan moneter Islam. Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang sistem yang berlaku pada ekonomi moneter Islam dan memahami kebijakan moneter dalam pandangan keuangan moneter Islam beserta konsep dan prinsipnya dan juga untuk mengetahui hubungan antara bank konvensional dan bank syariah dalam moneter Islam. Sistem moneter berhubungan erat dengan instrumen moneter salah satunya uang. Menurut Al Gazali, uang memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian.

Dalam perekonomian konvensional, sistem riba, *fiat money*, *fractional reserve*, sistem dalam perbankan dan diperbolehkannya spekulasi menyebabkan penciptaan uang (kartal dan giral) dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa resiko. Akibatnya, uang atau investasi yang seharusnya tersalur ke sektor riil untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sektor riil. Penciptaan uang tanpa adanya nilai tambah akan menimbulkan inflasi. Pada akhirnya, tujuan pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Sementara itu, dengan sistem zakat, bagi hasil, dan pelarangan spekulasi dalam perekonomian Islam, akan mendorong iklim investasi yang akan tersalur dengan lancar ke sektor riil untuk tujuan yang sepenuhnya produktif. Hal ini akan menjamin terdistribusinya kekayaan dan pendapatan serta menumbuhkan sektor riil.

Dengan meningkatnya produktifitas serta meningkatnya kesempatan bekerja sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi terdorong, dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai. perbankan syariah yang dikatakan masih baru jika dibandingkan dengan perbankan konvensional mempunyai pengaruh terhadap stabilitas perekonomian di Indonesia dan lebih efektif dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Indonesia serta mampu bertahan dalam menghadapi Inflasi dengan menggunakan sistem bagi hasilnya. Sistem perbankan Indonesia sudah pernah diuji pada saat krisis moneter tahun 1997, dimana banyak perbankan yang bangkrut dan bermasalah. Namun, krisis moneter memberikan pelajaran penting dalam perbaikan kebijakan keuangan dan sistem perbankan.

Dalam memainkan peran penting pada pertumbuhan ekonomi, maka perbankan secara umum melakukan merger dan akuisisi. Dalam upaya merger dan akuisisi diharapkan bisa berdaya saing lagi. Namun, terdapat satu perbankan yang masih berdiri dan bisa menghadapi krisis moneter yaitu bank Muamalat. Sejak tahun 1992, ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama Bank Muamalat, di Indonesia terdapat dua sistem perbankan, yaitu sistem bunga (*interest rate system*) dan sistem bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan sistem tanpa bunga (*free interest rate system*). Semenjak sistem syariah mempunyai instrumen SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) Indonesia mempunyai *dual monetary system* yakni mekanisme tingkat bunga dan bagi hasil.

Sistem bagi hasil sebagai sebuah perhitungan berdasarkan pendapatan produsen atau peminjam mempunyai sifat fleksibel terhadap pengembalian bagi hasilnya. Salah satu bank syariah di Indonesia pada masa itu. Dengan sistem ini pertambahan jumlah uang beredar akan mengikuti pertambahan output yang terjadi. Hal ini membuat sistem perbankan Islam menjadi sistem yang unik bagi perusahaan perbankan di Indonesia. Setelah terjadinya krisis pertumbuhan perbankan syariah cukup signifikan, dimana jumlah lembaga perbankan syariah semakin meningkat dari waktu ke waktu. Skenario ini mendorong terjadinya persaingan dalam kegiatan penyaluran kredit yang melibatkan lembaga perbankan syariah dan konvensional.

Dalam situasi ini, memberikan tantangan kepada para pembuat kebijakan untuk menjalankan alatsasaran kebijakan moneter yang berbasis sistem bebas bunga. Uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Islam tidak mengenal konsep *time value of money* sebagaimana dikenal dalam konsep uang konvensional. Dalam konsep ekonomi Islam selanjutnya, uang dikatakan milik masyarakat (*money is public goods*) karena sebagai milik umum, maka uang harus dapat digunakan masyarakat tanpa ada hambatan dari orang lain. Sistem moneter dalam ekonomi Islam harus mendukung terhadap fungsi uang sebagai alat tukar dan menghindarkan dari terjadinya penumpukan uang. Sistem moneter pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro suatu negara dengan usaha mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan secara baik melalui pengaturan jumlah uang beredar. Uang merupakan salah satu nikmat Allah SWT dan penopang kehidupan dunia. Karena itu uang harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syara'.

Dalam Ihya' Ulum al-Din, Al Gazali menyatakan bahwa salah satu nikmat Allah adalah telah diciptakannya dinar dan dirham sehingga dengan keduanya tegaklah dunia. Dinar dan dirham adalah benda mati yang pada hakekatnya tidak memiliki manfaat. Akan tetapi manusia membutuhkannya agar dapat mempunyai barang-barang, makanan, pakaian dan semua kebutuhan lainnya. Lebih lanjut ia juga menyatakan bahwa dinar dan dirham merupakan perantara terhadap sesuatu yang diinginkan. Didalam dinar dan dirham tidak ada manfaat manakala tidak ada keinginan terhadap sesuatu. Menurut Ibnu Taimiyah, uang adalah standar nilai (*mi'yar al-amwal*) dan merupakan alat tukar, selain itu uang tidak pernah dimaksudkan untuk dikonsumsi. Uang itu digunakan untuk mendapatkan barang lain (alat tukar) dan tidak untuk diperdagangkan. Ia mengemukakan tentang konsep volume fulus (uang) haruslah proporsional dengan volume transaksi dimana tingkat harga ditentukan, dan konsep ini dalam teori konvensional disebut sebagai *quantity theory of money* (Karim, 2004). Fungsi permintaan uang dalam Islam, mengikuti pendekatan Keynes model permintaan uang dalam ekonomi Islam sebagai berikut (Veithzal, 2010)

: $Md=f(Y_s, S, \pi)$ Dimana, Y_s = barang dan jasa yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dan investasi produktif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, S = semua nilai moral, sosial dan institusi-institusi (termasuk zakat) yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya dan dapat membantu meminimalkan Md , tidak hanya yang untuk konsumsi berlebihan dan investasi tidak produktif, tetapi juga yang untuk maksud berjaga-jaga dan spekulasi, dan π = tingkat bagi hasil dalam sistem yang tidak mengizinkan penggunaan suku bunga untuk intermediasi keuangan. Model ini belum pernah digunakan untuk kajian empiris, kemungkinan karena karakterisasi yang normatif dan tidak mencerminkan realitas yang ada, serta nilai S yang rumit dan kemungkinan tidak dapat dipraktekkan.

Dalam hal ini permintaan uang Islam juga ditinjau dari segi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (PYDS). Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan terlihat bahwa dalam perekonomian Islam, permintaan akan dana untuk investasi yang berorientasi kepada modal sendiri, merupakan bagian dari permintaan transaksi total dan bergantung kepada kondisi perekonomian dan laju keuntungan yang diharapkan. Mengingat harapan keuntungan tidak mengalami fluktuasi, permintaan agregat kebutuhan transaksi akan cenderung stabil. Stabilitas dalam permintaan uang untuk tujuan transaksi, akan cenderung mendorong stabilitas yang lebih besar bagi kecepatan peredaran uang dalam suatu fase daur bisnis dalam sebuah perekonomian Islam. Karena itu kebijakan moneter menggunakan variabel cadangan uang dan bukan suku bunga. bank sentral harus menggunakan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam kerangka harga-harga yang stabil. Tujuannya untuk menjamin ekspansi moneter yang pas, cukup menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor riil, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang. Kemudian persoalan mata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap dolar AS), tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut.

Selanjutnya kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (*interest*) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Persoalan kedua relatif bisa selesai andai saja semua bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat unsur riba dinyatakan dilarang. Lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, menjadi satu-satunya anak tunggal yang sah beroperasi di negeri ini menggantikan bank-bank konvensional. Dengan melarang semua transaksi ribawi, berarti telah menghilangkan faktor utama penyebab labilitas moneter. Sebaliknya, tetap membiarkan bank-bank konvensional berjalan (sekali pun pada saat yang sama juga beroperasi bank-bank syariah) sama saja memelihara penyakit yang sewaktu-waktu akan memporak-porandakan kembali bangunan tubuh ekonomi Indonesia. Sementara itu, persoalan pertama diatasi dengan cara mengkaji ulang mata uang kertas yang selama beberapa puluh tahun terakhir diterima begitu saja tanpa *reserve* (*taken for granted*), seolah tidak ada persoalan di

dalamnya. Berapa banyak diantara kita yang menyangka bahwa uang kertas yang setiap hari ada di kantong kita menyimpan sebuah persoalan begitu mendasar. Berkenaan dengan mata uang, Islam memiliki pandangan yang khas.

Abdul Qadim Zallum mengatakan bahwa system moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap sistem keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan (al-wahdatu al-naqdiyyatu al-asasiyah) dimana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Apabila satuan dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangan/moneternya dinamakan sistem uang emas. Apabila satuan dasarnya perak, dinamakan sistem uang perak. Bila satuan dasarnya terdiri dari dua satuan mata uang (emas dan perak), dinamakan sistem dua logam. Dan bila nilai satuan mata uang tidak dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak (baik terbuat dari logam lain seperti tembaga atau dibuat dari kertas), sistem keuangannya disebut sistem fiat money. Dalam sistem dua logam, harus ditentukan suatu perbandingan yang sifatnya tetap dalam berat maupun kemurnian antara satuan mata uang emas dengan perak.

LANDASAN TEORI

Keuangan adalah istilah untuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, penciptaan, dan studi tentang uang dan investasi. Keuangan dapat secara luas dibagi menjadi tiga kategori, keuangan publik, keuangan perusahaan, dan keuangan pribadi. Ada banyak kategori spesifik lainnya, seperti keuangan perilaku, yang berupaya mengidentifikasi alasan kognitif di balik keputusan keuangan.

Saat ini, "keuangan" biasanya dipecah menjadi tiga kategori besar: Keuangan publik meliputi sistem pajak, pengeluaran pemerintah, prosedur anggaran, kebijakan dan instrumen stabilisasi, masalah utang, dan masalah pemerintah lainnya. Keuangan perusahaan melibatkan pengelolaan aset, kewajiban, pendapatan, dan utang untuk bisnis. Keuangan pribadi mendefinisikan semua keputusan keuangan dan kegiatan individu atau rumah tangga, termasuk penganggaran, asuransi, perencanaan hipotek, tabungan, dan perencanaan pensiun.

Pemerintah membantu mencegah kegagalan pasar dengan mengawasi alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Pendanaan rutin untuk program-program ini sebagian besar dijamin melalui perpajakan. Meminjam dari bank, dan perusahaan asuransi serta mendapatkan dividen dari perusahaannya juga membantu membiayai pemerintahan.

Keuangan Perusahaan memperoleh pembiayaan melalui berbagai cara, mulai dari investasi ekuitas hingga pengaturan kredit. Suatu perusahaan dapat mengambil pinjaman dari bank atau mengatur jalur kredit. Memperoleh dan mengelola utang dengan tepat dapat membantu perusahaan berkembang dan menjadi lebih menguntungkan.

Keuangan Pribadi. Perencanaan keuangan pribadi umumnya melibatkan analisis posisi keuangan individu atau keluarga saat ini, memprediksi kebutuhan jangka pendek, dan jangka panjang, dan melaksanakan rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam batasan keuangan individu. Keuangan pribadi sangat tergantung pada pendapatan seseorang, kebutuhan hidup, dan tujuan serta keinginan individu.

Mashuri dalam jurnalnya yang berjudul syistem keuangnan syariah dalam menngentaskan kemiskinan menjelaskan bahwa Lembaga keuangan dengan system syariah hadir untuk memberi jasa keuangnan halal kepada komunitas muslim. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi perluasan kesempatan kerja, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi keadilan sisioekonomi serta distribusi pendapatan kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembanngunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh

pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat.

Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi, seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Hal ini didasari pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 mengenai Kebijakan Moneter Bank Indonesia.

Selain kebijakan moneter, terdapat kebijakan fiskal yang juga berguna dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Bedanya, kebijakan fiskal merupakan keputusan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran negara. Penerapan kebijakan fiskal dapat dilihat melalui pengelolaan pajak dan APBN. Sementara, kebijakan moneter di Indonesia bisa diperhatikan melalui kebijakan diskonto, suku bunga bank, dan sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia, tujuan kebijakan moneter yang utama yakni menjaga kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan hal tersebut, banyak aspek yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter adalah (1) Menjamin stabilitas ekonomi, (2) Mengendalikan inflasi, (3) Meningkatkan lapangan pekerjaan, (4) Melindungi stabilitas harga di pasar, (5) Menjaga keseimbangan neraca pembayaran Internasional, (6) Mendorong pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi pustaka yaitu menganalisis dari berbagai sumber buku yang terkait dengan obyek penelitian dengan tahapan sebagai berikut;

1. Tahapan pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela'ahan (library reaseach) dengan mengumpulkan bahan pustaka/refrensi, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.

2. Tahapan pengolahan data

Untuk mengolah data yang telah diinventarisir kemudian digunakan teknik sebagai berikut (a) Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan satuan-satuan klasifikasi dan menentukan kesimpulan secara general. (b) Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus. (c) Komperatif, yaitu membandingkan teori-teori, hukum dan pendapat para tokoh intelektual yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mata Uang dan Moneter dalam pandangan keuangan Islam

Dalam sistem moneter ekonomi, pengaturan jumlah uang beredar diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: Pertama, kebijakan Moneter Ekspansif (*Monetary Expansive Policy*) yaitu suatu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang beredar. Kedua, kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary Contractive Policy*) atau kebijakan uang ketat (*tight money policy*) yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar. Lembaga perbankan syari'ah mempunyai sifat universal dan multi guna serta tidak semata-mata

merupakan bank komersil. Ia merupakan perpaduan antara bank komersial, bank investasi, investasi kepercayaan dan institusi pengelola investasi (*investment-management institutions*), yang berorientasi pada investasi modal.

Dengan pola ini maka perbankan syariah akan jauh dari perilaku *borrowing short* dan *lending long*. Karena itu ia kokoh terhadap ancaman krisis dibanding perbankan konvensional. Berdasar fakta itu pula, maka kedudukan bank sentral dalam konteks ekonomi Islam harus dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian riil secara seimbang (Soekarno, 2015). Kebijakan moneter ini adalah kebijakan dari pemerintah Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor riil, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, menjadi satu-satunya anak tunggal yang sah beroperasi di negeri ini menggantikan bank-bank konvensional. Dengan melarang semua transaksi ribawi, berarti telah menghilangkan faktor utama penyebab labilitas moneter.

Berkenaan dengan mata uang, Islam memiliki pandangan yang khas. Abdul Qodim Zallum mengatakan bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara, yang paling penting dalam setiap sistem keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan (*al-wahdatu al-naqdiyatu al-asasiyah*) dimana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Apabila satuan dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangan atau moneternya dinamakan sistem uang emas.

Apabila satuan dasarnya perak, dinamakan sistem uang perak. Bila satuan dasarnya terdiri dari dua satuan mata uang (emas dan perak), dinamakan sistem dua logam. Dan bila nilai satuan mata uang tidak dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak (baik terbuat dari logam lain seperti tembaga atau dibuat dari kertas), sistem keuangannya disebut sistem *fiat money*. Sistem uang dua logam yang diadopsi oleh Rasulullah SAW. Ketika itu kendati menggunakan sistem uang dua logam, Rasulullah SAW memang tidak mencetak dinar dan dirham emas sendiri, tapi menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia (ini juga menunjukkan bahwa sistem uang dua logam tidak eksklusif hanya dilakukan oleh umat Islam). Untuk menuju sistem uang dua logam.

Abdul Qodim Zallum menyarankan sejumlah hal. Diantaranya, menghentikan pencetakan uang kertas dan menggantinya dengan uang dua logam dan menghilangkan hambatan dalam ekspor dan impor emas. Pemanfaatan emas sebagai mata uang tentu akan mendorong eksplorasi dan eksploitasi emas (mungkin secara besar-besaran) untuk mencukupi kebutuhan transaksi yang semakin meningkat. Adapun mata uang Islam yang pertama kali dicetak oleh kantor percetakan negara Islam baru terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah (65-86 H/685- 705 M), sesudah merundingkannya dalam musyawarah dengan para ulama dan pemuka. Maksud pembuatan mata uang itu diketahui oleh Keizer Romawi yang menganggapnya telah merusak hubungan ekonomi antara Arab dan Romawi. Ia mengirimkan surat ancaman kepada Khalifah Abdul Malik agar menghentikan usahanya itu demi hubungan baik antara kedua negara. Mata uang Islam yang pertama ini diberi nama Dimaskiyah, sesuai dengan nama kota tempat mencetaknya, Damaskus. Khalifah mengirimkan mata uang itu ke seluruh negara, memerintahkan supaya seluruh mata uang Romawi dan Persi dibekukan, serta tidak boleh beredar lagi. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa mata uang berfungsi sebagai alat tukar dan nilai harga dalam seluruh transaksi ekonomi, ditetapkan menurut mata uang sendiri.⁴ Oleh karena itu, Al-Ghazali mengemukakan orang

yang menimbun uang. Orang demikian dikatakannya sebagai penjahat. Yang lebih buruk lagi adalah orang melebur dinar dan dirham menjadi perhiasan emas dan perak. Mereka ini dikatakannya sebagai orang yang tidak bersyukur kepada Sang Pencipta.

2. Kebijakan Moneter Pada Masa Rasulullah

Mata uang yang digunakan bangsa arab, baik sebelum atau sesudahnya, adalah dinar dan dirham. Kedua mata uang tersebut memiliki nilai uang yang tetap dan karenanya tidak ada masalah dalam perputaran uang. Walaupun demikian, dalam perkembangan berikutnya, dirham lebih umum digunakan daripada dinar. Hal ini sangat berkaitan erat dengan penaklukan tentara Islam terhadap hampir seluruh wilayah kekaisaran Persia. Sementara itu, tidak semua wilayah kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh tentara Islam. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW ini, kedua mata uang tersebut diimpor, dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Besarnya volume dinar dan dirham yang diimpor dan juga barang-barang komoditas bergantung kepada volume komoditas yang diekspor ke dua negara tersebut dan wilayah-wilayah lain yang berada dibawah pengaruhnya. Lazimnya, uang akan diimpor jika permintaan uang (*money demand*) pada pasar internal mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, komoditas akan diimpor apabila permintaan uang mengalami penurunan karena tidak adanya pemberlakuan tarif dan bea masuk pada barang impor, uang diimpor dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan internal. Pada sisi lain, nilai emas dan perak pada kepingan dinar dan dirham sama dengan nilai nominal (*face value*) uangnya, sehingga keduanya dapat dibuat perhiasan atau ornamen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada awal periode Islam, penawaran uang (*money supply*) terhadap pendapatan, sangat elastis. Frekuensi transaksi perdagangan dan jasa, menciptakan permintaan uang. Karena itu motif utama permintaan terhadap uang pada masa ini adalah permintaan transaksi (*transaction demand*). Sementara itu adanya peperangan antara kaum Quraisy dan kaum muslimin (sedikitnya terjadi 26 ghazwah dan 32 sariyah yang berarti rata-rata 5 kali perang dalam setiap tahunnya), telah menimbulkan permintaan uang untuk berjaga-jaga (*precautionary demand*) terhadap kebutuhan yang tidak terduga. Akibatnya, permintaan terhadap uang selama periode ini secara umum bersifat permintaan transaksi dan pencegahan. Larangan penimbunan, baik uang maupun komoditas, dan talqī rukhban tidak memberikan kesempatan kepada penggunaan uang dengan selain kedua motif tersebut.

3. Instrumen Moneter Islam

Terdapat empat instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Pertama, Operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*). Adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah (*government security*). Kedua, Fasilitas diskonto (*Discount Rate*). Yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. Ketiga, Rasio cadangan wajib (*Reserve Requirement Ratio*). Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. Keempat, Imbauan Moral (*Moral Persuasion*). Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai.

Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulisan dan keterbukaan dalam

berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan AL Qur'an dalam QS.Al-An'am:152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

.... Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat (Q.S. Al-An'am:152)

Mengenai stabilitas nilai uang juga ditegaskan oleh M. Umar Chapra (Al Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil), kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum. Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip, moneter syaria'ah berbeda dengan yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya. Adapun instrumen moneter syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrument.

Moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlyingnya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (*bank rates, discount rate, open market operation* dengan sekuritas bunga yang ditetapkan didepan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat kredit, seperti *Reserve Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base*. Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain: kredit, seperti *Reserve Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base*. Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain:

Reserve Ratio, Adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.

Moral Suasion, Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikurangkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.

Lending Ratio, Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah Lending (meminjamkan), lending ratio dalam hal ini berarti Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan).

Refinance Ratio, Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika *refinance ratio* meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika *refinance ratio* turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.

Profit Sharing Ratio, Rasio bagi keuntungan (*profit sharing ratio*) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan *profit sharing ratio* sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka *ratio* keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.

Government Investment Certificate, Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai *Treasury Bills*. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. *Treasury Bills* ini tidak bisa diterima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga, yang disebut *GIC: Government Instrument Certificate*.

4. Prinsip Dasar Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang diinginkan. Kebijakan moneter dalam Islam berbijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut :

- a. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allohlah pemilik yang absolut.
- b. Manusia merupakan Pemimpin (khalifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
- c. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.
- d. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun tapi kekayaan harus diputar.
- e. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan.

Pengaturan perekonomian negara dalam perspektif prinsip ekonomi syariah yang bisa menjadi hikmah. Indikator kesuksesan perekonomian sebuah negara dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik saja, namun juga ditentukan oleh ada atau tidaknya keadilan dalam kesejahteraan masyarakat, dan keadaan keimanan penduduknya yang tercermin pada keadaan moral, etika dan performa sektor sosial atau ketaatan penduduk dalam membayar ZIS. Kebijakan dasar perekonomian negara adalah melalui mekanisme zakat dan pelarangan riba. Dalam perspektif Islam, jika semua kegiatan usaha dipaksa mengikuti laju suku bunga maka akan terjadi eksploitasi peserta ekonomi yang lemah oleh peserta yang lebih kuat yang akan menyuburkan spekulasi, inflasi dan menumpuknya harta pada sekelompok orang. Karena itulah sistem ekonomi negara harus selalu mengintegrasikan sektor moneter dengan sektor riil sebagai konsekuensi dilarangnya riba, gharar (ketidakjelasan) dan spekulasi. Kebijakan pemerintah secara umum dalam perekonomian Islam adalah mengoptimalkan sektor sosial dan institusi penunjang pasar. Perekonomian Islam sangat mendukung kegiatan bisnis atau perdagangan, mengedepankan produktivitas dalam pertumbuhan sektor riil yang berbasis halal-haram dan manfaat-mudarat dengan basis transaksi jual beli, sewa menyewa dan bagi hasil. Optimalisasi institusi pasar akan menghidupkan basis-basis produksi, meningkatkan produktifitas, menekan inflasi, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan dan menjadikan produk asing hanya sebagai mitra atau pelengkap saja. Optimalisasi sektor sosial akan memberikan rasa tentram dan aman kepada rakyat.

5. Konsep Ekonomi Moneter Islam

Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimum dan stabilitas ekonomi. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan Al-Quran dalam Qs.Al.Anam:152, yang artinya dan “janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengutamakan suku bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Perekonomian Jazirah Arabia ketika itu adalah perekonomian dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya alam lainnya terbatas.

Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount rate tersebut. Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga, tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi. Perbedaan utama sistem moneter Islam secara konseptual, sistem moneter Islam kontemporer dan sistem moneter konvensional ditunjukkan dalam tabel berikut:

Table 1. Konsep Sistem Moneter Islam

No	Konvensional	Islam Konseptual	Islam Kontemporer
1	Sistem Uang Fiat	Sistem Uang Islam – full Bodied	Sistem Uang Fiat- fully backed money
2	Fractional Reserve Banking System	100 Percent Reserve Banking System	Fractional Reserve Banking
3	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil	Sistem Bagi Hasil

KESIMPULAN

Kebijakan moneter adalah kebijakan dari pemerintah Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor riil, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan disepertar masalah uang. Lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, menjadi satu-satunya anak tunggal yang sah beroperasi di negeri ini menggantikan bank-bank konvensional. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: Pertama, kebijakan Moneter Ekspansif (*Monetary Expansive Policy*) yaitu suatu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang beredar. Kedua, kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary Contractive Policy*) atau kebijakan uang ketat (*tight*

money policy) yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar. Lembaga perbankan syari'ah mempunyai sifat universal dan multi guna serta tidak semata-mata merupakan bank komersil. Kebijakan moneter pada masa Rasulullah adalah dengan adanya mata uang dinar dan dirham kedua mata uang tersebut diimpor, dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Besarnya volume dinar dan dirham yang diimpor dan juga barang-barang komoditas bergantung kepada volume komoditas yang diekspor ke dua negara tersebut dan wilayah-wilayah lain yang berada dibawah pengaruhnya.

Lazimnya, uang akan diimpor jika permintaan uang (*money demand*) pada pasar internal mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, komoditas akan diimpor apabila permintaan uang mengalami penurunan karena tidak adanya pemberlakuan tarif dan beamasuk pada barang impor, uang diimpor dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan internal. pada awal periode Islam, penawaran uang (*money supply*) terhadap pendapatan, sangat elastis. Frekuensi transaksi perdagangan dan jasa, menciptakan permintaan uang. Karena itu motif utama permintaan terhadap uang pada masa ini adalah permintaan transaksi (*transaction demand*). Ada empat instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Pertama, Operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*). Adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah (*government security*). Kedua, Fasilitas diskonto (*Discount Rate*). Yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. Ketiga, Rasio cadangan wajib (*Reserve Requirement Ratio*). Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil disbanding sebelumnya. Keempat, Imbauan Moral (*Moral Persuasion*).

Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut, Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut, manusia merupakan Pemimpin (khalifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya dan Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun tapi kekayaan harus diputar.

Hal ini disebutkan AL Quran dalam QS.Al.Anam:152, yang artinya dan “janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”

DAFTAR REFERENSI

- Adytya, B. 2021. Krisis Moneter Adalah Krisis Keuangan, Ketahui Dampak, Ciri Hingga Penyebabnya. [Krisis Moneter adalah Krisis Keuangan, Ketahui Dampak, Ciri Hingga Penyebabnya | merdeka.com](https://merdeka.com)
- Aisyah, S & Nurmala, S. 2019. *Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam Dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam*. Vol 7. No 2. Jurnal Syariah..
- Anshori, M & Shofiyuddin, M. A. (2021). *Peran Kebijakan Moneter Terhadap Kemampuan Perbankan Dalam Penyaluran Pembiayaan*. Vol 7 No 1. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Atika. 2018. *Analisa Komparasi Sistem Ekonomi Moneter Islam Dengan Sistem Ekonomi Moneter*

- Konvensional Ditinjau Dari Stabilitas Perekonomian Indonesia*. Vol 8. No. 2. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik.
- CNN Indonesia. 2020. *Ekonomi Syariah Bisa Dongkrak Pertumbuhan Saat Corona*. [Ekonomi Syariah Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Saat Corona \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200515112000-005-ekonomi-syariah-bisa-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi-saat-corona)
- Ibrahim, A, dkk. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. Jakarta
- Mesy, A. S. 2011. *Kemerdekaan Ekonomi Vs Prinsip Ekonomi Syariah*. [Kemerdekaan Ekonomi Vs Prinsip Ekonomi Syariah | Republika Online](https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/11/05/110511-ekonomi-syariah)
- Nizar, M. 2012. *Pengantar Ekonomi Islam*. Kurnia Advertising. Malang
- Purnomo, J.H. 2019. *Uang dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam*. Vol 1. No 2. Journal of Syaria Economics.
- Purnamasari, D.M. 2021. *Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah*. [Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah \(kompas.com\)](https://www.kompas.com/read/2021/05/15/wapres-pastikan-pemerintah-terus-dorong-pengembangan-ekonomi-syariah)
- Prasetyo, A. 2017. *Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam*. Vol 22. No 1.
- Rais, R. 2012. *Ekonomi Moneter : Tinjauan Sejarah Ekonomi Islam*. Vol 4 No 2.
- Slamet, A. 2009. *Mekanisme Syariah pada Sistem Moneter Ganda di Indonesia*. Buletin Ekonomi dan Perbankan.